

Makalah Diskusi No. 8

INISIATIF SEKTOR SWASTA UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KAKAO, KOPI, DAN KARET DI INDONESIA

oleh Mercyta Jorsvinna Glorya dan Arief Nugraha



Makalah Diskusi No. 8
**Inisiatif Sektor Swasta untuk Meningkatkan Produktivitas
Kakao, Kopi, dan Karet di Indonesia**

Penulis:

Mercyta Jorsvinna Glorya
Arief Nugraha

Ucapan Terima Kasih:

Kami berterima kasih kepada Pingkan Audrine Kosijungan, Nadia Fairuza Azzahra dan Maeve Milligan yang telah membantu penelitian ini.

Jakarta, Indonesia
November, 2019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia adalah produsen utama kakao, kopi, dan karet. Ketiga komoditas ini mewakili sumber pendapatan penting bagi petani Indonesia. Akan tetapi, produktivitas kakao dan kopi di Indonesia lebih rendah secara signifikan dibandingkan negara-negara produsen lainnya, dan produktivitas karet juga masih harus dikembangkan lagi untuk mencapai potensinya. Di tengah adanya perdebatan mengenai akurasi data produktivitas pemerintah, semua organisasi yang terlibat setuju bahwa masih banyak upaya perbaikan yang bisa dilakukan.

Pemerintah pusat telah mengimplementasikan beberapa kebijakan dan program guna meningkatkan produktivitas petani termasuk subsidi bibit dan pupuk, fasilitasi akses ke layanan finansial, dan program ekspansi lahan. Inisiatif-inisiatif ini, akan tetapi, dipandang tidak efektif oleh banyak ahli karena gagal untuk mempertimbangkan perbedaan-perbedaan wilayah, memberikan pelatihan yang efektif, atau melakukan pengawasan yang cukup di lapangan. Alih-alih, para ahli yang diwawancarai untuk penelitian ini mengacu pada pelaku sektor swasta sebagai penyedia dukungan yang berhasil.

Pelaku sektor swasta, termasuk perusahaan multi-nasional, produsen lokal, dan LSM, mengimplementasikan program-program yang terdiri dari fasilitasi akses terhadap layanan finansial dan pelatihan literasi finansial, program manajemen kualitas yang memberikan penawaran bagi petani yang menghasilkan produk berkualitas premium, dan program pertanian kontrak yang menjamin kestabilan harga. Para pelaku sektor swasta bekerja dekat dengan para petani dan mampu untuk mempertimbangkan kebutuhan pribadi mereka, sehingga membuat mereka bisa mengalokasikan sumber daya yang ada dengan lebih efektif. Beberapa badan pemerintah Indonesia telah mulai bekerja sama dengan inisiatif sektor swasta untuk meningkatkan kualitas hidup para petani.

Studi ini menyarankan pemerintah untuk melanjutkan dan meningkatkan kerja sama ini, serta melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan swasta dalam upaya untuk meningkatkan tingkat produktivitas domestik.

INDUSTRI KAKAO, KOPI, DAN KARET INDONESIA

Indonesia di antara produsen utama kopi, kakao, dan karet di dunia menduduki peringkat kedua sebagai produsen karet (OECD, 2012), ketiga untuk kakao (Kementerian Luar Negeri RI, 2012), dan keempat untuk kopi (Badan Ekonomi Kreatif RI, 2017) secara global.

Sesuai dengan program jangka panjang pemerintah, *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025*, kopi, kakao, dan karet adalah tiga dari 22 komoditas utama yang perluasan dan kesejahteraannya diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk 'dukungan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Indonesia.' (Bappenas, 2011). Ketiga komoditas ini berkontribusi dengan porsi yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sub-sektor Tanaman Perkebunan, yang mencapai nilai Rp387.501,5 miliar dan merupakan sub-sektor terbesar di bawah sektor Pertanian, Perhutanan, dan Perikanan (Bank Indonesia, 2019).

Indonesia di antara produsen utama kopi, kakao, dan karet di dunia menduduki peringkat kedua sebagai produsen karet (OECD, 2012), ketiga untuk kakao (Kementerian Luar Negeri RI, 2012), dan keempat untuk kopi (Badan Ekonomi Kreatif RI, 2017) secara global.

Ketiga komoditas ini berkontribusi dengan porsi yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sub-sektor Tanaman Perkebunan, yang mencapai nilai Rp387.501,5 miliar dan merupakan sub-sektor terbesar di bawah sektor Pertanian, Perhutanan, dan Perikanan (Bank Indonesia, 2019).

Komoditas-komoditas yang menjanjikan ini juga merupakan sumber pendapatan yang dapat diperhitungkan untuk sektor ekspor pertanian. Karet memiliki nilai tertinggi dengan pendapatan \$4.958,3 juta per tahun, diikuti oleh kopi dengan pendapatan \$1.175,4 juta, dan kakao dengan pendapatan \$53,5 juta (Badan Pusat Statistik, 2018). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan (2017), agregat tenaga kerja Indonesia sangat bergantung pada ketiga industri ini untuk pekerjaan, karena industri ini mempekerjakan 1.726.359 petani kakao pada 2016, dan 1.770.508 petani kopi, dan 250.886 petani karet pada 2017.

DATA PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS

Dalam laporan terakhir Kementerian Pertanian (Kementan), produksi kakao, kopi, dan karet pada 2017 tercatat sebesar 659.776 ton, 668.677 ton, dan 3.629.544 ton.

Dalam laporan terakhir Kementerian Pertanian (Kementan), produksi kakao, kopi, dan karet pada 2017 tercatat sebesar 659.776 ton, 668.677 ton, dan 3.629.544 ton.

Tabel 1.
Tingkat produksi resmi kakao, kopi, dan karet (2012 - 2017)

Produksi	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kakao (ton)	740.500	720.900	728.400	593.331	659.399	659.776
Kopi (ton)	691.163	675.800	643.900	639.412	639.305	668.677
Karet (ton)	3.012.254	3.237.433	3.153.186	3.145.398	3.357.951	3.629.544

Sumber: FAOSTAT. (2019). *Indonesian cocoa, coffee, and rubber production: 2012-2017*.
Diambil dari <http://www.fao.org/faostat/en/#compare>

Data Kementan menunjukkan penurunan produksi kakao dan kopi, dan peningkatan produksi karet. Data ini dipertanyakan oleh beberapa pihak yang percaya Kementan mengestimasi angka produksi terlalu tinggi di beberapa industri. Berdasarkan wawancara dengan Nestlé dan ICCRI (*Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute*), data Kementan tentang karet dan kopi secara umum diterima oleh para pelaku industri, tetapi beberapa ahli di industri kakao tidak setuju dengan penemuan Kementan tersebut. Mereka mengklaim angka produksi Kementan terlalu tinggi, mencatat hampir dua kali lipat dari produksi yang dicatat oleh sektor swasta, yang meyakini produksi hanya berkisar antara 350.000 hingga 400.000 ton setiap tahunnya (Swisscontact, wawancara, 2019; Cocoa Sustainability Partnership, wawancara, 2019). Pada 2018 hal ini diketahui oleh Dirjen Tanaman Perkebunan, Ir. Bambang, yang menyadari perlunya peningkatan akurasi data Kementan (Cocoa Sustainability Partnership, 2018). Berdasarkan data dari situs Direktorat Jenderal Perkebunan, proses pengumpulan data Kementan sangatlah panjang, karena data harus diberikan oleh petani melalui serangkaian petugas Kementan sebelum akhirnya dimasukkan ke Dirjen Perkebunan, yang kemudian merilis datanya ke publik. Lembaga bantuan internasional Swisscontact, yang aktif dalam industri kakao, menggunakan data dari para petani kemudian memberikan bimbingan, serta menjaga tanggung jawab pengumpulan dan penghitungan data dalam satu kantor (Swisscontact, wawancara,

2019). Mereka merekomendasikan cara pengumpulan data seperti ini, menunjukkan bahwa proses pengumpulan data Kementan yang panjang sangat rentan terhadap eror. Akan tetapi, meskipun data Kementan banyak dikritik, namun data tersebut tetap digunakan oleh organisasi internasional seperti organisasi pangan dan pertanian dunia PBB (FAO).

Tabel 2.
Tingkat produksi resmi kakao, kopi, dan karet (2012 - 2017)

Produktivitas	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kakao (Ton/ha)	0,57	0,41	0,42	0,35	0,39	0,38
Kopi (Ton/ha)	0,56	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53
Karet (Ton/ha)	0,86	0,87	0,87	0,87	0,91	0,99

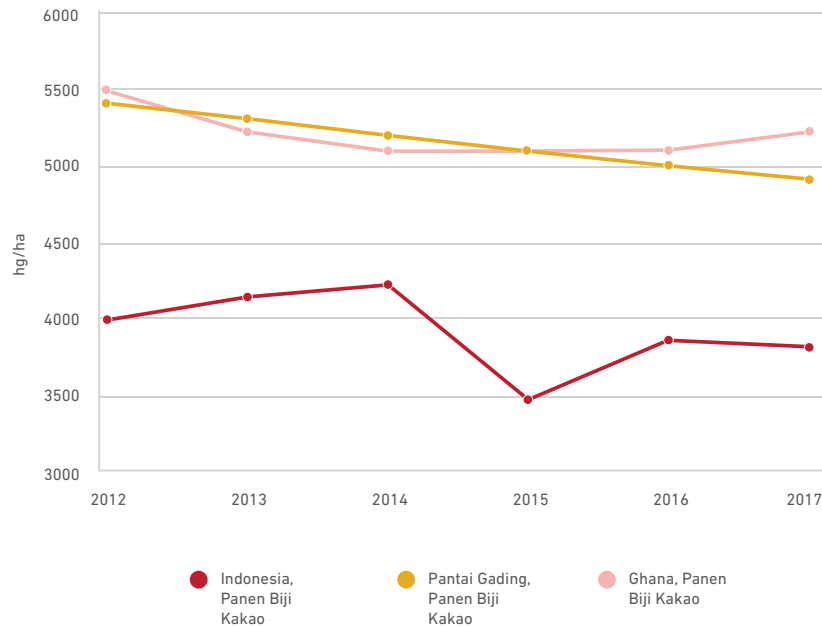
Source: FAOSTAT. (2019). *Indonesian cocoa, coffee, and rubber production: 2012-2017*. Retrieved from <http://www.fao.org/faostat/en/#compare>

Meskipun ada debat mengenai akurasi data produksi, Indonesia tetap merupakan produsen penting. Akan tetapi, produktivitas ketiga komoditas ini tetap rendah. Tingkat produktivitas kakao dan kopi Indonesia adalah yang terendah di antara negara-negara produsen top dunia. Ghana dan Pantai Gading memproduksi lebih banyak kakao dari 0,1 hingga 0,2 ton per tahun dari tahun 2012 hingga 2017 jika dibandingkan dengan Indonesia. Produktivitas kopi Vietnam sudah hampir lima kali lipat dibandingkan Indonesia sejak tahun 2014 dengan memproduksi lebih dari 2,5 ton per hektare pada tahun 2017. Makalah yang disiapkan oleh Kementerian Perdagangan Indonesia menjelaskan bahwa dalam volume tinggi/biaya rendah kopi robusta Vietnam, Indonesia adalah kompetitor langsung, dan meskipun biaya produksi yang lebih tinggi, data menunjukkan bahwa Vietnam memiliki tingkat profit yang lebih tinggi (Neilson et al., 2015). Produktivitas kopi Brazil juga sudah hampir tiga kali lipat lebih tinggi daripada Indonesia, dan Kolombia sudah sekitar dua kali lipat lebih tinggi sejak 2015. Meskipun produktivitas karet Indonesia telah menjadi kedua tertinggi di dunia sejak 2013, tingkat produktivitas tertinggi yang diduduki Thailand masih hampir dua kali lipat daripada produktivitas di Indonesia. Gambar 1.1, 1.2, dan 1.3 menunjukkan data panen kakao, kopi, dan karet seperti dibandingkan dengan produsen-produsen utama lainnya antara 2012 dan 2017. Terdapat konsensus di antara organisasi-organisasi yang terlibat dalam industri kopi, kakao, dan karet bahwa produktivitas ketiga komoditas tersebut di Indonesia belum mencapai potensi terbaiknya.

Meskipun ada debat mengenai akurasi data produksi, Indonesia tetap merupakan produsen penting.

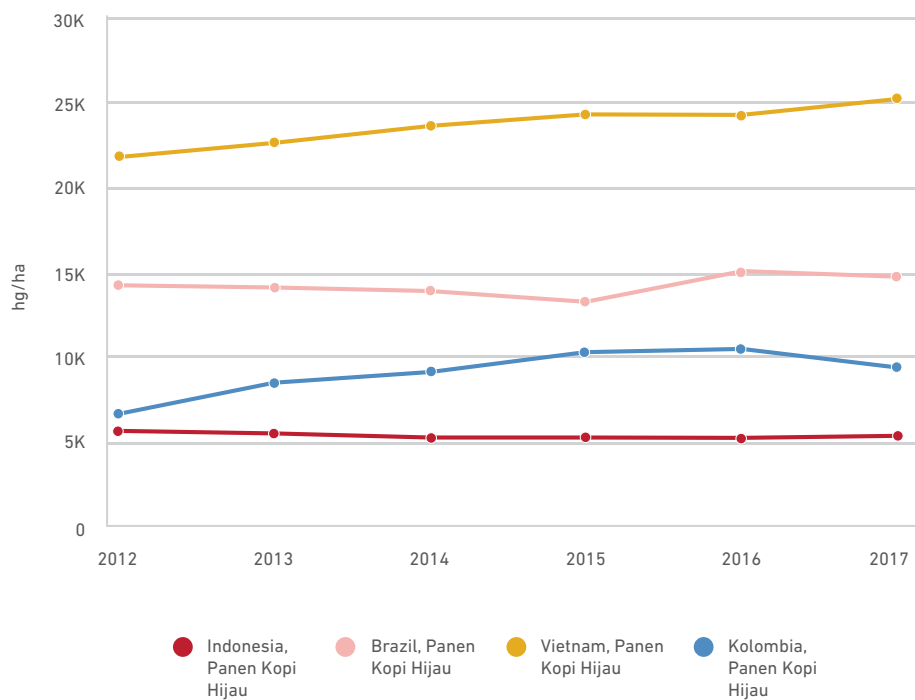
Terdapat konsensus di antara organisasi-organisasi yang terlibat dalam industri kopi, kakao, dan karet bahwa produktivitas ketiga komoditas tersebut di Indonesia belum mencapai potensi terbaiknya.

Gambar 1.1
Hasil Panen Kakao dari 2012 hingga 2017



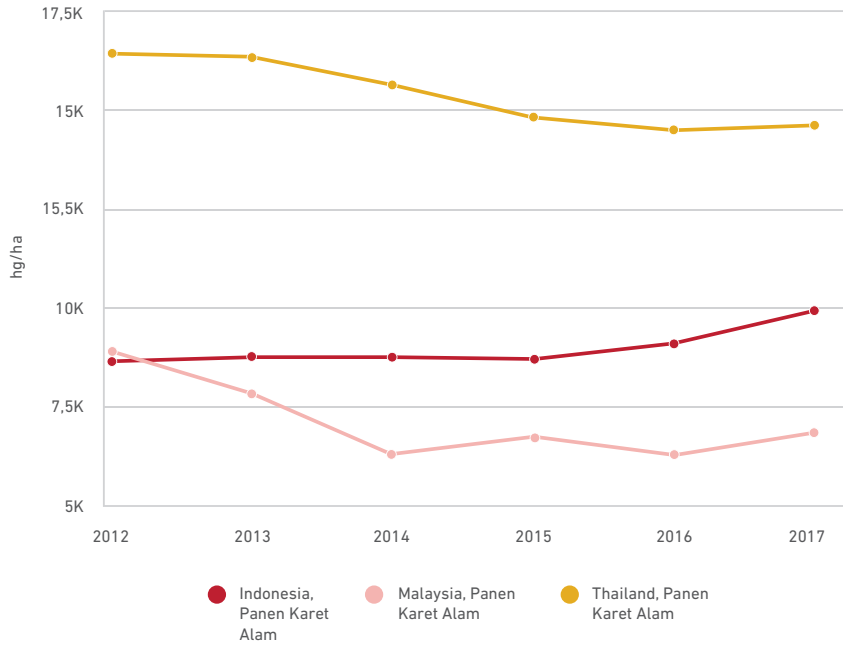
Sumber: FFAOSTAT. (n.d.)

Gambar 1.2
Hasil Panen Kopi dari 2012 hingga 2017



Sumber: FFAOSTAT. (n.d.)

Gambar 1.3
Hasil Panen Karet dari 2012 hingga 2017



Sumber: FFAOSTAT. (n.d.)

MASALAH YANG DIHADAPI INDUSTRI KAKAO, KOPI, DAN KARET INDONESIA

Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap produktivitas yang rendah, tetapi sebagai produsen utama, Indonesia memiliki banyak sekali keuntungan dari peningkatan produktivitas dan pendapatan pertanian di industri ini.

“Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap produktivitas yang rendah, tetapi sebagai produsen utama, Indonesia memiliki banyak sekali keuntungan dari peningkatan produktivitas dan pendapatan pertanian di industri ini.”

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), Indonesia memiliki produktivitas kakao terendah di antara ketiga produsen utama di dunia sejak 2011 (FAOSTAT, n.d.). Ada beberapa alasan untuk hal itu, termasuk pohon yang menua, wabah, petani lanjut usia, dan fakta bahwa kakao semakin menjadi tanaman berprioritas rendah (Abdullah, 2017). Menurut Organisasi Kakao Internasional (ICCO), pohon kakao dianggap produktif hingga usia 25 tahun, tetapi banyak pohon kakao di Indonesia yang ditanam pada tahun 1990an, sehingga usianya sudah lebih dari 25 tahun. Petani seringkali kekurangan sumber daya finansial untuk berinvestasi pada bibit, yang membutuhkan hingga 5 tahun sampai menghasilkan buah kakao. Pohon kakao juga rentan terhadap wabah seperti wabah buah hitam, yang dapat menghancurkan hingga satu hektare tanah pertanian dalam hampir satu malam (Indonesia Investments, 2016). Petani lanjut usia, yang kebanyakan adalah petani kecil yang memiliki lahan 1 sampai 3 hektar, tidak dapat menanggung risiko tersebut. Sebuah makalah oleh Neilson dan Mckenzie (2016) mencatat bahwa kakao adalah sektor yang tidak berkelanjutan secara ekologis dan ekonomis, dan sistem pengelolaan yang ada tidak berhasil mendorong petani untuk mengadopsi praktik-praktik yang berkelanjutan. Alih-alih petani justru memilih untuk meninggalkan kakao untuk industri yang lain seperti karet dan kelapa sawit (Jasman, 2016). Petani yang tetap menanam kakao bertujuan untuk mendapatkan dana cepat dengan menjual biji yang belum difermentasi segera setelah panen, sehingga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pertambahan nilai dari pemrosesan yang dapat meningkatkan kualitas dan harga dari biji yang mereka jual (Oktaviani, et al., 2016). Siklus buruk tersebut membuat petani jadi enggan untuk mempraktikkan inovasi untuk meningkatkan produktivitas (Rubiyo & Siswanto, 2012).

Produktivitas rendah industri kakao Indonesia berbarengan dengan rendahnya kualitas kakao itu sendiri. Standar kualitas kakao diatur oleh “ISO 2451 Biji Kakao - Persyaratan Spesifikasi dan Kualitas” yang meliputi ukuran dan warna, hingga kadar air, persiapan dan klasifikasi biji kakao. Akan tetapi, kakao Indonesia seringkali tidak mencapai standar tersebut dan kebanyakan digunakan untuk membuat bubuk kakao dan produk kosmetik (Kalimajari, wawancara, 2019). Untuk memproduksi coklat, biji kakao Indonesia kerap kali harus dicampur dengan biji kakao impor yang sudah difermentasi yang biasanya berasal dari Ghana atau Pantai Gading (Kalimajari, wawancara, 2019).

Industri kopi kinerjanya sedikit lebih baik daripada industri kakao. Neilson et al. (2015) menunjukkan bahwa hasil panen dan produktivitas kopi levelnya rendah berdasarkan standar internasional, dan laporan tersebut juga menjelaskan bahwa sebab dari produktivitas rendah tersebut banyak dan bermacam-macam. Industri kopi menderita banyak sekali masalah yang sama seperti industri kakao. Seperti pohon kakao, perkebunan kopi paling produktif dalam rentang waktu usia 5 hingga 25 tahun, tetapi banyak petani di Indonesia yang mengandalkan tanaman di usia 20an akhir. Wabah seperti kumbang penggerek kopi (CBB) merupakan ancaman bagi tanaman, sedangkan pupuk harganya mahal serta seringkali diberikan terlalu sedikit (Neilson et al., 2015). Seperti halnya industri kakao, biji kopi diekspor segera setelah dipanen. Kopi yang belum diproses biasa disebut kopi hijau, dan seringkali diekspor dalam jumlah besar (Global Business Guide Indonesia, 2014).

Meskipun curah hujan dan lahan di Indonesia dapat ditanami baik Robusta, biji kopi yang lebih murah, dan Arabika, produk yang lebih kaya rasa dan mahal, lebih dari 80% kopi yang diproduksi di Indonesia adalah Robusta (Nangoy & Nicholson, 2018). Hal ini disebabkan karena petani bisa mendapatkan uang lebih mudah dengan menjual kopi Robusta, karena pasar Robusta lebih umum dan pembelinya lebih banyak. Akan tetapi, telah dicatat juga oleh peneliti seperti Neilson (2007) bahwa harga *farmgate* untuk Arabika cenderung lebih rendah daripada Robusta karena biji Arabika seringkali membutuhkan proses ekstensif setelah meninggalkan perkebunan. Tetap saja, kopi-kopi tertentu dengan rasa khas dari daerah-daerah yang berbeda baru-baru ini menjadi terkenal baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jenis-jenis tersebut di antaranya Gayo, Mandailing, dan Toraja. Pasar untuk kopi Indonesia sedang bertumbuh, dan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari pemrosesan kopi berkualitas lebih tinggi meningkat (Neilson et al., 2015).

Seperti kakao dan kopi, pohon karet di Indonesia, yang produktif pada usia antara 7 hingga 25 tahun, sudah melewati masa kejayaannya namun mahal untuk ditanam ulang (IBP, 2016). Menurut ahli dari Indonesian Rubber Research Institute, mengganti pohon yang sudah tua dengan kloning pohon karet superior, yang dapat menghasilkan lebih banyak hasil panen, sehingga dapat meningkatkan produktivitas karet (IRRC, 2019). Masalah terbesar yang dihadapi manufaktur karet Indonesia adalah kualitas. Di Indonesia, kualitas karet diukur dengan *Standard Indonesian Rubber* (SIR), yang mengatur standar mirip dengan standar internasional yang diatur oleh ISO 2000:2014 (Badan Standardisasi Nasional, 2017). Menurut standar internasional, karet alam yang baik seperti TSR-20¹ tidak bisa melebihi ukuran tertentu dalam hal kandungan tanah, abu, nitrogen, materi volatil, dan komponen lainnya. Sayangnya, mayoritas karet Indonesia tidak bisa memenuhi standar ini atau tidak dapat bersaing dengan karet berkualitas lebih tinggi dari Thailand dan Malaysia. Sitepu (2016) mengonfirmasi bahwa petani karet Indonesia, yang kebanyakan adalah petani kecil, memproduksi karet berkualitas rendah dan berupaya untuk beradaptasi dengan kondisi industri yang berubah. Minimnya pengembangan industri hilir juga memperkeruh masalah yang sudah ada (Global Business Guide Indonesia, 2016) dan membuat penyerapan karet di Indonesia relatif rendah, karena karet tidak bisa diproses lebih lanjut menjadi produk yang berguna. Faktor-faktor ini menjadi penyebab ketergantungan pada pasar-pasar internasional, di mana harga karet menurun oleh karena besarnya jumlah ekspor dari negara-negara produsen dan pengembang karet sintetis.

¹ Jenis karet ini juga dikenal dengan nama 'karet spesifikasi teknis' (Technically Specified Rubber/TSR), dan merupakan jenis yang paling banyak diekspor dari Indonesia.

KEBIJAKAN NASIONAL YANG MENDUKUNG INDUSTRI KAKAO, KOPI, DAN KARET INDONESIA SERTA KEKURANGANNYA

“Walaupun terdapat beberapa kasus sukses, program pemerintah sendiri secara umum tidak efektif dalam meningkatkan produktivitas secara signifikan di ketiga industri yang diteliti dalam makalah ini. Hal itu disebabkan karena pemerintah kurang mempertimbangkan dan menekankan perbedaan kualitas regional, pengawasan yang tidak cukup, dan upaya yang lemah untuk mengedukasi petani tentang kualitas dan keberlanjutan.”

Pemerintah Indonesia telah merespon dengan beberapa inisiatif untuk menanggulangi masalah yang dihadapi oleh ketiga komoditas ini. Inisiatif-inisiatif tersebut terdiri dari bantuan finansial, suplai bibit dan peralatan, perluasan lahan, subsidi budidaya tanaman, dan layanan ekstensif pemerintah. Inisiatif tersebut, akan tetapi, dituduh telah diaplikasikan tanpa pengertian yang cukup apakah akan menguntungkan para petani atau tidak. Penelitian seperti Neilson dan Mckenzie (2016) telah mengkritik inisiatif pemerintah karena tidak mengadopsi pendekatan penelitian partisipatif dan tidak melibatkan petani dalam merancang program. Walaupun terdapat beberapa kasus sukses, program pemerintah sendiri secara umum tidak efektif dalam meningkatkan produktivitas secara signifikan di ketiga industri yang diteliti dalam makalah ini. Hal itu disebabkan karena pemerintah kurang mempertimbangkan dan menekankan perbedaan kualitas regional, pengawasan yang tidak cukup, dan upaya yang lemah untuk mengedukasi petani tentang kualitas dan keberlanjutan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, melalui program *MPEI* (2011), berusaha meningkatkan kualitas dan produktivitas kakao dengan beberapa target sebagai berikut:

- Meningkatkan produksi, dan produktivitas berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas kakao;
- Meningkatkan kualitas biji kakao melalui fermentasi dan sertifikasi Gerakan Nasional Fermentasi kakao (GERNAS) (Kementan, 2014)²; dan
- Mengakselerasi persyaratan infrastruktur yang mendukung pengembangan industri kakao nasional.

Kementan telah membuat program dukungan termasuk investasi di industri kakao hingga hampir \$250 juta (Rp2,4 triliun) dari 2010-2014, dan terus berinvestasi seperti yang dirancang dalam Perencanaan Strategis untuk Kementerian Pertanian: 2015-2019 (Rafani, 2015). Kementan juga berencana untuk menyediakan bibit untuk wilayah yang menanam kakao di Indonesia (Abdoellah, 2017). Lebih dari lima tahun ke depan (2019-2024) Kementan berharap untuk menanam sekitar 160 juta biji kakao kualitas superior di lebih dari 140 ribu hektar, sehingga dapat meningkatkan produktivitas hingga tiga kali lipat (Zainuddin, 2019). Dengan menyediakan bibit bagi para petani Kementan berharap dapat mengurangi biaya tanam tanaman baru dan mendorong petani untuk mengganti pohon yang sudah menua dengan bibit yang lebih produktif. Program ini juga menawarkan pupuk dan pestisida bersubsidi untuk membantu memerangi wabah dan menurunkan risiko yang harus ditanggung oleh para petani kecil. Selain itu, sejak tahun 2012 Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mendistribusikan mesin kakao kepada provinsi-

² Kementerian Pertanian. (2014). Peraturan menteri pertanian Republik Indonesia nomor 67/permentan/OT.140/5/2014. Kementerian Pertanian, Jakarta.

provinsi di Indonesia yang memproduksi kakao di Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Mesin-mesin ini dimaksudkan untuk lebih lanjut memodernisasi industri hilir kakao dan memfasilitasi pemrosesan biji kakao dalam negeri. Mesin tersebut diharapkan dapat mengurangi kebutuhan para petani untuk menjual biji yang belum difermentasi kepada pasar internasional dimana permintaan terhadap kakao yang belum difermentasikan cukup besar. Upaya ini seharusnya membuat industri kakao Indonesia dapat meningkatkan pertambahan nilai dan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.

Akan tetapi, program-program ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku sektor industri Kakao. Para ahli mencatat bahwa dari periode tahun 2009 hingga 2015 produksi kakao menurun, meskipun program ekstensif dari pemerintah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan produksi (Neilson & Mckenzie, 2016). Kebijakan seringkali tidak mempertimbangkan perbedaan regional, sehingga akhirnya muncul masalah dari kebijakan yang dibuat seragam tersebut. Contohnya, bibit yang memiliki kualitas cukup dan diuji oleh pusat penelitian kakao di Jawa, ketika sampai di Sulawesi ternyata tidak bisa menghasilkan buah karena ada perbedaan tipe tanah. Pupuk dan pestisida yang disubsidi juga sulit untuk didapatkan di wilayah-wilayah terpencil, dan biasanya dijual oleh para makelar yang memiliki reputasi tidak bertanggung jawab (Leimona, et al., 2015). Neilson (2007) menunjukkan bahwa pestisida tidak diregulasi dengan cukup dan produk pestisida yang sudah rusak serta tercemar dan bisa merusak tanaman sangat gencar dijual oleh para distributor di wilayah-wilayah yang memproduksi kakao. Selain itu, mesin-mesin kakao seringkali tidak diberikan ke daerah-daerah produsen kakao utama, melainkan ke daerah di mana petani kakao sudah tidak produktif lagi (Swisscontact, wawancara, 2019). Fold dan Neilson (2007) mencatat bahwa program pemerintah seringkali tidak mempertanyakan tepat guna teknologi yang didistribusikan ke para petani kecil, dan kebanyakan dari mereka tidak dapat atau menolak teknologi yang tidak diperlukan dan mahal tersebut. Penelitian serupa juga mengklaim bahwa hasil dari program pemerintah mengecewakan karena kurangnya pengawasan, dan para ahli serta pelaku bisnis yang terlibat di sektor ini setuju kalau pengawasan di lapangan oleh pemerintah hampir tidak ada (Swisscontact, wawancara, 2019; Kalimajari, wawancara, 2019). Kurangnya pelatihan komprehensif bagi para petani juga kerap dikemukakan sebagai masalah yang tidak ditanggulangi dengan cukup oleh kebijakan pemerintah. Untuk meningkatkan produktivitas, petani akan diuntungkan dengan adanya sertifikasi UTZ dan USDA. Fold dan Neilson (2018) menunjukkan bahwa pasar untuk kopi bersertifikat tengah berkembang, karena pembeli besar seperti Mars telah berkomitmen untuk membeli 100% biji kopi bersertifikat segera di tahun 2020. Sertifikat akan memberikan petani kakao daya jual yang lebih baik ketika menjual produk mereka, tetapi hal ini tidak ada di dalam program pemerintah (Kalimajari, wawancara, 2019).

Kebijakan seringkali tidak mempertimbangkan perbedaan regional, sehingga akhirnya muncul masalah dari kebijakan yang dibuat seragam tersebut.

Untuk bisnis kopi, Kemenperin mengembangkan rencana 2015-2020 yang termasuk di dalamnya penelitian dan pengembangan, mengimplementasikan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk inovasi dan membuat pemrosesan kopi di Indonesia lebih beragam, mendorong naik produksi biji kopi Arabika, memperbanyak ragam produk kopi yang sudah diproses, dan modernisasi struktur hilir industri kopi (Departemen Perindustrian, 2009). Dengan mengimplementasikan SNI pemerintah berharap untuk meningkatkan kualitas kopi dan menjadikan kopi Indonesia lebih kompetitif di pasar internasional. Kementan juga berusaha untuk meningkatkan produktivitas kopi melalui alokasi finansial, perluasan lahan, pelatihan *Good Agricultural Practices (GAP)*, dan

juga pengawasan lapangan.

“ Dengan mengimplementasikan SNI pemerintah berharap untuk meningkatkan kualitas kopi dan menjadikan kopi Indonesia lebih kompetitif di pasar internasional. ”

Pebisnis kopi dan ahli kopi melihat kesenjangan pada kebijakan-kebijakan yang ada. Seperti misalnya, ketika SNI diimplementasikan sehingga mampu meningkatkan kualitas kopi, jumlah pengawas lapangan yang mampu memberikan pelatihan kepada petani tentang teknik menanam dan pasca-menanam terbatas, dan tidak semua petani kopi dapat diuntungkan oleh bantuan pemerintah (ICCRI, 2019). Laporan Bank Dunia (2015) mengonfirmasi bahwa penyediaan hal-hal seperti layanan ekstensif kepada petani kopi sangat disfungsi (Neilson, et al., 2015). Meskipun ada penggalakkan standar, namun tidak ada pengawasan yang cukup untuk memastikan petani telah memenuhi standar-standar baru tersebut. Oleh karena pemerintah tidak dapat menegakkan standar kualitas, sektor swasta di industri kopi mengganti standar pemerintah dengan peraturan sendiri. Sebuah studi oleh Vicol et al. (2018) menjelaskan bahwa peraturan yang dibuat sendiri tersebut sudah menjadi model utama dari pengaturan rantai nilai agro-pangan dalam dua dekade terakhir. Terlebih lagi, permintaan pasar internasional tetap pada biji Robusta yang lebih murah, dan akan sulit untuk mendapat pembeli yang mau membayar untuk kualitas premium. Hal tersebut membuat penanaman biji Arabika menjadi tidak menarik, meskipun program pemerintah mendorong penanaman biji kopi jenis tersebut. Sehingga hasilnya, industri hilir yang masih berkembang beroperasi di bawah kapasitasnya, karena masih berusaha untuk memastikan suplai kopi berkualitas tinggi yang konsisten. Dikarenakan harga yang tidak terjamin dan petani kopi menjual biji kopi mereka dengan harga murah, seringkali mereka menanam komoditas lain yang lebih menguntungkan dan membutuhkan perhatian lebih sedikit.

“ Peningkatan produktivitas karet disebutkan di dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 ”

Peningkatan produktivitas karet disebutkan di dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga telah menandatangani perjanjian dengan Thailand dan Malaysia pada rapat komite kementerian khusus *International Tripartite Rubber Council* (ITRC) pada Februari 2019 untuk menanam kembali karet alam hingga 50.000 hektar per tahun (ASEAN Rubber Business Council, 2019). Para pihak berjanji untuk mengimplementasikan program jangka panjang penanaman karet kembali menggunakan *Supply Management Scheme* (SMS) (Setyowati, n.d.). Sebuah program yang diimplementasikan oleh Kementan untuk meningkatkan sektor karet di Indonesia lebih lanjut yang melibatkan alokasi finansial guna peningkatan dari Rp53 miliar pada tahun 2015 menjadi hampir Rp60 miliar (\$4 juta) pada tahun 2019 (Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, 2015). Lahan untuk penanaman karet diharapkan bisa meningkat hingga 5.280 hektar per tahun. Selain itu, pihak kementerian juga merencanakan program untuk revitalisasi tanaman, distribusi bibit, dan pinjaman serta jaminan harga bagi para petani.

Namun, kebijakan-kebijakan ini berfokus utamanya pada peningkatan luas perkebunan, tetapi melupakan masalah utama yang dihadapi industri ini, yaitu kualitas. Ahli karet mempertanyakan kebijakan perluasan lahan karena Indonesia sudah memegang predikat area perkebunan karet terbesar di dunia, dan area hutan yang dibutuhkan untuk membuka lahan menjadi lebih

bernilai. Para ahli juga menyebutkan bahwa program penanaman kembali tidak mempertimbangkan keberlanjutan yang lebih luas, yang dapat memberikan dampak bukan hanya pada lingkungan, tetapi juga pada tingkat suplai yang ada dan yang akan datang (Sitepu, 2016). Mendorong produktivitas karet memerlukan program penanaman kembali yang lebih visioner, yang berfokus bukan pada memperluas lahan pertanian, tetapi dengan meningkatkan kloning pohon karet superior yang dapat memproduksi lateks berkualitas lebih tinggi. Saat ini hanya 60% perkebunan karet Indonesia yang menggunakan kloning pohon karet berkualitas superior. Untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi serupa dengan Thailand misalnya, kloning pohon karet superior harus diberikan ke semua perkebunan karet di seluruh Indonesia (IRRC, wawancara, 2019).

Masalah kualitas tidak cukup ditangani dengan program pemerintah, yang secara membabi buta hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Program-program tersebut juga tidak menekankan pada edukasi petani tentang pentingnya kualitas, sehingga akibatnya mereka mengekspor produk karet yang tidak kompetitif. Beberapa pihak berargumentasi bahwa petani alih-alih harus menerima jaminan harga karet dan pinjaman yang lebih stabil untuk keperluan berkebun mereka, yang akan mendorong mereka untuk berinvestasi pada peningkatan produktivitas. Meskipun hal tersebut sudah dicoba untuk ditangani dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, tetapi implementasinya tidak mencukupi. Banyak ahli yang diwawancara untuk penelitian ini percaya bahwa solusi saat ini yang ditawarkan oleh Kementan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian harus diperluas dan ditingkatkan lagi.

Dalam menghadapi penurunan harga di pasar karet dunia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian setuju dengan Thailand dan Malaysia untuk tiga kebijakan ITRC guna menstabilkan harga karet. Indonesia akan memotong volume ekspor karet alam, memperluas penggunaan domestik karet untuk konstruksi, dan melakukan penanaman kembali di perkebunan karet (Susilo & Nasution, 2019). Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (GAPKINDO) akan mengawasi pemotongan ekspor (Aisyah, 2019). Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar menggunakan karet alam untuk penggunaan aspal di seluruh Indonesia sehingga bisa menyerap penggunaan karet alam domestik. Sejak 2018, beberapa provinsi seperti Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi telah mengaspal jalan menggunakan aspal yang memiliki kandungan karet (GAPKINDO, 2019).

Program-program pemerintah mencoba untuk mengatasi banyak masalah yang dihadapi oleh industri-industri utama ini, tetapi kerap kali dilakukan dengan tidak efisien. Tanpa pemahaman yang cukup akan kebutuhan para petani, program ini secara tidak tepat menargetkan area-area tertentu dari ketiga industri ini dan membiarkan yang lainnya tanpa bantuan. Program industri kakao berfokus pada menyediakan input yang disubsidi, tetapi lalu mengalokasikannya dengan tidak efektif dan tidak memberikan edukasi atau pengawasan untuk memastikan input yang diberikan digunakan dengan benar. Program industri kopi berfokus pada peningkatan kualitas, tetapi tetap tidak mampu untuk mengawasi kualitas, dan tidak bisa menjamin konsistensi pasar untuk kualitas kopi yang lebih baik. Program industri karet mendorong perluasan lahan, padahal masalah utama yang dihadapi para petani adalah rendahnya kualitas.

Saat ini hanya 60% perkebunan karet Indonesia yang menggunakan kloning pohon karet berkualitas superior.

SOLUSI YANG DIBERIKAN OLEH INISIATIF SEKTOR SWASTA

Sudah lebih dari dua dekade pelaku sektor swasta menjadi lebih terlibat dalam rantai nilai agro-pangan.

Sektor swasta memberikan solusi tambahan untuk meningkatkan produktivitas kakao, kopi dan karet. Sudah lebih dari dua dekade pelaku sektor swasta menjadi lebih terlibat dalam rantai nilai agro-pangan. Menurut Vicol et al. (2018), pembeli agro-pangan semakin lama semakin khawatir terhadap keberlangsungan suplai mereka, terutama untuk industri kakao di mana saat ini sedang berkembang ketidakpastian suplai global. Pelaku sektor swasta juga sering berinvestasi finansial di ranah industri mereka, dan oleh karena itu termotivasi untuk memastikan keberhasilan program-program yang ada. Masalah seperti kurangnya pertimbangan akan adanya perbedaan dan kualitas regional, kurangnya pengawasan, dan edukasi petani yang tidak memadai lebih mudah untuk ditangani oleh para pihak swasta, karena mereka kerap kali bekerja dengan sejumlah kecil petani yang paling dekat dengan mereka. Neilson (2007) menyarankan bahwa cara yang paling efektif agar pemerintah dapat meningkatkan produktivitas perkebunan adalah dengan menyediakan dukungan kerangka kerja dimana intervensi internasional dapat berhasil. Hanya dengan bermitra dengan sektor swasta maka pemerintah dapat membuat perubahan dengan program-programnya.

Setiap aktor memiliki spesialisasi pada komoditas tertentu: Nestlé berfokus pada kopi, Swisscontact dan Kalimajari khusus pada kakao, dan Kirana Megatara pada karet.

Inisiatif dari empat pelaku sektor swasta lokal dan internasional telah diidentifikasi untuk keperluan penelitian ini. Pelaku internasional yang dimaksud termasuk lembaga bantuan internasional (Swisscontact), perusahaan multi-nasional (Nestlé), perusahaan lokal (Kirana Megatara), dan LSM lokal (Kalimajari). Setiap aktor memiliki spesialisasi pada komoditas tertentu: Nestlé berfokus pada kopi, Swisscontact dan Kalimajari khusus pada kakao, dan Kirana Megatara pada karet. Keempat pelaku tersebut telah membimbing sejumlah signifikan petani kakao, kopi, dan kakao di Indonesia, dan mampu meningkatkan angka produktivitas hampir melampaui perkiraan. Beberapa instansi lokal dan provinsi telah mulai bekerja sama dengan pelaku sektor swasta dan berhasil secara efektif menyampaikan sumber daya nasional kepada petani yang membutuhkan. Kesuksesan tersebut dapat dijadikan model bagi para pembuat kebijakan untuk dicontoh dan mendorong sektor swasta dan badan pemerintah lainnya untuk turut terlibat.

Dimulai sebagai bisnis keluarga pada tahun 1866, Nestlé adalah perusahaan makanan dan minuman yang kantor pusatnya berlokasi di Vevey, Swiss. Nestlé mempekerjakan sekitar 230.000 orang di lebih dari 84 negara, dengan 466 pabrik dan kantor di setidaknya 70 negara (Nestlé, 2019). Swisscontact adalah yayasan independen berorientasi bisnis dalam pengembangan kerja sama internasional. Yayasan ini bekerja di 30 negara dan tujuan utama dari 100 proyek pengembangannya adalah untuk menciptakan kesempatan berwirausaha. Kelompok kerja Swisscontact yang berada di setiap lokasi proyek pengembangan mereka, mengidentifikasi dan melatih pelaku lokal hingga mereka bisa dengan mandiri mengembangkan usaha mereka (Swisscontact, 2019) LSM Indonesia bernama Kalimajari berlokasi di Bali. Mereka bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup petani kakao dengan menawarkan pelatihan ekonomi, finansial, dan seputar teknik berkebun. LSM ini bermitra dengan pemangku kepentingan lokal dan bertujuan untuk mengembangkan produk biji kakao yang sudah difermentasi serta pasarnya di Indonesia (Kalimajari, 2019). Kalimajari dibiayai oleh pemerintah Indonesia dan juga lembaga-lembaga bantuan asing. Pelaku keempat adalah Kirana Megatara, produsen remah karet terbesar di Indonesia, memiliki lebih dari 18% pasar karet di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi

Technically Specified Rubber (TSR) (SIR 10, SIR 20, dan SIR 20 CV), yang kebanyakan digunakan untuk memproduksi ban mobil. Karet yang diproduksi oleh Kirana Megatara kebanyakan diekspor ke pembuat ban internasional, seperti Apollo, Bridgestone, dan Micheline (Kirana Megatara, n.d.).

Inisiatif dari keempat pihak tersebut sangat berbeda dengan inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sebuah makalah oleh Neilson (2007) menunjukkan bahwa dinamika permintaan industri agro-pangan global sangatlah rumit dan memerlukan keterlibatan dekat dari organisasi swasta besar di tingkat lokal dan regional. Keterlibatan ini kemudian menghasilkan program yang dapat lebih mudah diubah untuk memenuhi kebutuhan petani lokal. Inisiatif sektor swasta berfokus utamanya pada edukasi petani dan menyediakan solusi bagi mereka agar dapat meningkatkan pendapatan mereka secara mandiri. Beberapa dari inisiatif ini termasuk edukasi mengenai bagaimana mengakses layanan finansial, insentif untuk meningkatkan kualitas melalui program manajemen kualitas, dan pertanian kontrak, yang menjamin stabilitas harga dan hubungan yang baik antara petani dan para pelaku lain dalam rantai suplai. Terlebih lagi, para pelaku sektor swasta ini sangat memandang perlu adanya pengawasan lapangan, dan mereka juga sudah menjalin kemitraan dengan beberapa LSM dan perusahaan swasta untuk membantu kegiatan pengawasan. Industri ini juga terlihat telah meningkatkan keterlibatan pemerintah dalam kerja sama untuk kegiatan pengawasan.

Inisiatif sektor swasta berfokus utamanya pada edukasi petani dan menyediakan solusi bagi mereka agar dapat meningkatkan pendapatan mereka secara mandiri.

INTERVENSI FINANSIAL

Baik Swisscontact dan Nestlé telah melakukan program intervensi finansial dengan menyediakan akses dukungan finansial kepada para petani. Program-program ini menekankan pentingnya literasi finansial dan bertujuan untuk mengembangkan hubungan antara bank dan petani.

“**Petani yang diuntungkan dengan subsidi pemerintah meminjam dengan pengawasan terbatas dan seringkali berinvestasi di luar industri kakao, mengingat sumber pendapatan mereka bukan dari kakao.**”

Laporan GERNAS (2008) menyarankan reformasi sektor perbankan, administrasi lahan, dan administrasi praktik perbankan, tetapi petani tetap menghadapi masalah untuk mendapatkan pinjaman resmi. Sementara program pemerintah juga termasuk akses ke layanan finansial yang difasilitasi, program yang diimplementasikan oleh Swisscontact dan Nestlé lebih lanjut memasukkan pengawasan dan monitoring berkelanjutan. Mereka bekerja langsung dengan petani dan bank, memastikan pinjaman digunakan untuk meningkatkan produktivitas kakao alih-alih untuk modal lain atau penggunaan pribadi. Menurut Vicol et al., (2019) Petani yang diuntungkan dengan subsidi pemerintah meminjam dengan pengawasan terbatas dan seringkali berinvestasi di luar industri kakao, mengingat sumber pendapatan mereka bukan dari kakao. Dengan menghindari terjadinya hal itu, Swisscontact dan Nestlé dapat meningkatkan investasi di produktivitas kakao dengan lebih efektif daripada program pemerintah.

A. Meyakinkan Bank yang Berpotensi bagi Petani Kakao oleh Swisscontact

Bank biasanya melihat petani sebagai ranah yang tidak cocok dengan sektor finansial. Pihak bank biasanya melihat petani sebagai sosok yang memiliki latar belakang pendidikan yang minim dan probabilitas rendah untuk membayar pinjaman. Petani juga biasanya merasa tidak nyaman untuk mengajukan pinjaman untuk pembiayaan kebutuhan tani mereka, karena mereka melihat bank biasanya melayani nasabah di perkotaan (Ashari & Friyatno, 2006). Program Jaminan Pembiayaan Kakao yang dibuat oleh Swisscontact mencoba untuk mengatasi masalah ini. Dalam program ini, tugas utama Swisscontact adalah untuk meyakinkan bank untuk memberikan pinjaman kepada petani kakao. Swisscontact akan menyediakan alternatif yang sudah dikaji secara komprehensif untuk dijadikan jaminan, yang pada dasarnya masih seputar biji kopi itu sendiri karena mudah untuk dikumpulkan, bisa dipisahkan, cepat untuk dicairkan, dan sangat diminati di wilayah-wilayah produsen kakao (Swisscontact, 2017). Selain itu, mereka juga melatih bank cara untuk memilih petani yang bisa membayar pinjaman. Swisscontact mengadakan rapat tahunan mereka antara dengan kedua belah pihak, agar petani dapat bertanya langsung pada bank, dan bank dapat berinteraksi langsung dengan petani. Program ini merawat hubungan yang baik antara kedua belah pihak dan meningkatkan tingkat kepercayaan.

B. Skema Kredit Lokal Nestlé di Lampung

Nestlé menyediakan pelatihan finansial dan perbankan bagi petani kopi di Lampung. Bermitra dengan bank BTPN lokal, mereka mengajarkan petani tentang bagaimana cara membuat rekening bank di kios-kios terdekat dari desa mereka. Mereka menyederhanakan prosesnya hingga petani dapat membuka rekening melalui telepon pintar mereka. Pertama-tama petani belajar bagaimana cara menabung dan melakukan transaksi perbankan lainnya, kemudian mereka akan diizinkan untuk mengajukan kredit mikro melalui skema kredit yang disubsidi pemerintah (Kredit Usaha Rakyat). Pinjaman ini tidak diberikan dalam bentuk uang tunai melainkan sebagai pinjaman untuk membeli pupuk, karena petani sering menggunakan uang

tunai mereka untuk membeli hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan tani mereka. Upaya Nestlé ini telah mengajarkan literasi finansial kepada 16.000 hingga 20.000 petani dan juga telah memberikan akses ke kredit mikro pada mereka. Hal ini juga telah mendorong petani untuk menggunakan lebih banyak uang mereka untuk membeli pupuk, yang sangat penting untuk menghasilkan kakao berkualitas tinggi.

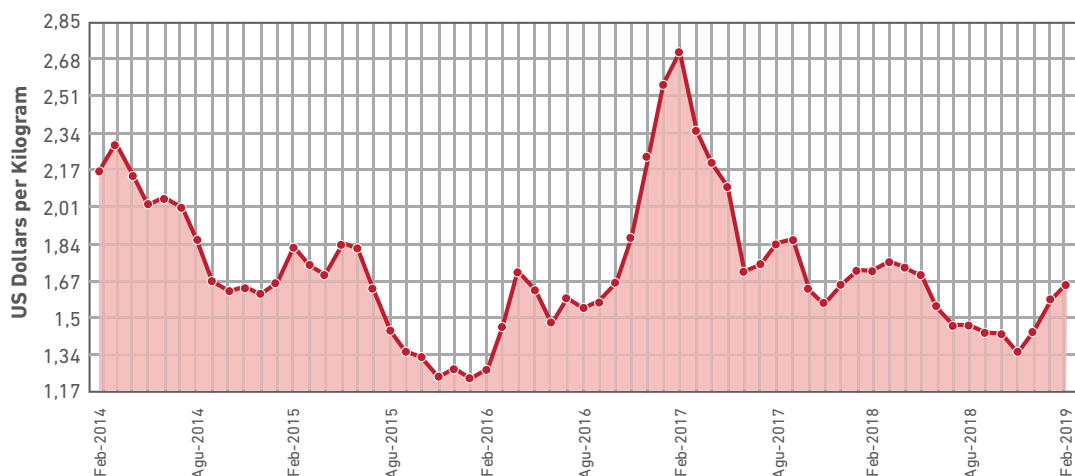
Program ini menggambarkan upaya langsung yang dilakukan oleh pelaku sektor swasta untuk mengedukasi petani dan meningkatkan kemandirian mereka. Inisiatif ini secara spesifik bertujuan untuk memfasilitasi akses ke layanan finansial, sementara itu dengan prinsip yang sama Swisscontact juga membuat Sustainable Cocoa Production Program (SCPP) (Swisscontact, n.d.), dan Nestlé dengan Nestlé Cocoa Plan (Nestlé, n.d.), yang keduanya dengan signifikan telah meningkatkan produktivitas kakao. Program pemerintah seperti skema pinjaman bersubsidi dapat menguntungkan para petani, tetapi petani jarang mengaksesnya karena kurangnya edukasi, pertimbangan perbedaan antar wilayah, dan pengawasan. Berikut ini adalah perbandingan kesuksesan inisiatif sektor swasta.

PROGRAM MANAJEMAN KUALITAS OLEH KIRANA MEGATARA

Industri karet di Indonesia dikenal memproduksi karet berkualitas rendah dan tidak dapat memenuhi standar internasional. Hal ini tidak secara efektif ditangani oleh program pemerintah, yang alih-alih justru mendorong petani untuk meningkatkan luas kebun mereka. Akan tetapi, sektor swasta lebih sadar akan kondisi tersebut dan ingin melakukan sesuatu untuk memperbaikinya. Perusahaan lokal bernama Kirana Megatara menangani isu ini secara langsung. Perusahaan ini menawarkan harga yang lebih tinggi untuk karet berkualitas tinggi, dan menjalin hubungan baik dengan para petani lokal untuk mengedukasi mereka tentang kualitas.

Tengkulak biasanya membeli karet dari petani dengan harga yang murah: Rp7.000/kg - Rp8.000/kg untuk karet yang sudah dikeringkan dan Rp3.000/kg - Rp4.000/kg untuk karet basah (Kirana Megatara, wawancara, 2019). Sementara itu, Kirana Megatara menawarkan harga yang lebih tinggi yang sesuai dengan harga di Singapore Commodity Exchange (SICOM), yang menentukan dan mempublikasikan harga dunia untuk karet alam (Tokyo Commodity Exchange, 2010).

Gambar 2.
Harga Karet Singapore Commodity Exchange (SICOM) 2014 - 2019



Sumber: Singapore Commodity Exchange (n.d)

Dari 2014 hingga 2019, harga karet yang dibayarkan Kirana Megatara berkisar dari Rp17.000 (\$1,24) per kilo pada November 2015 dan Januari 2016 hingga Rp36.000 (\$2,7) per kilo pada Februari 2017. Namun, harga tersebut hanya berlaku ketika petani menjual karetnya yang dianggap bersih dan tidak mengandung gipsum, tanah, dan batu. Kemudian karet juga harus dikeringkan selama dua minggu dan tidak dicelupkan ke air dari kolam atau bendungan (Kirana Megatara, wawancara, 2019). Untuk mengecek apakah produk sesuai dengan standar karet bersih, Kirana Megatara mengoperasikan sebuah laboratorium di setiap pabriknya. Laboratorium

itu dapat diakses oleh petani, yang dapat mengamati bagaimana para petugas mengecek kualitas karet mereka, sehingga praktik kecurangan bisa dihindari dari kedua belah pihak.

Dengan memastikan kualitas, Kirana Megatara membuat karet Indonesia lebih kompetitif di pasar internasional, dan mendorong petani untuk berinvestasi pada praktik-praktik yang meningkatkan kualitas, seperti misalnya menggunakan kloning pohon karet yang berkualitas superior. Program manajemen kualitas memotivasi petani untuk berinovasi dan memperbolehkan mereka untuk menjual produk mereka dengan harga yang lebih tinggi, sesuatu yang gagal dilakukan oleh program pemerintah.

PROGRAM KONTRAK PERKEBUNAN OLEH KALIMAJARI

Kebijakan pemerintah yang mendorong produksi kakao berkualitas, namun dengan minimnya pengawasan, dan ketidakmampuan untuk memberikan jaminan harga membuat kakao berkualitas tidak menarik.

Petani di Indonesia memiliki kapasitas untuk memproduksi kakao berkualitas tinggi, tetapi pembeli yang dapat membeli kualitas premium dengan konsisten tidak ada, kebanyakan dari mereka tidak mampu. Kebijakan pemerintah yang mendorong produksi kakao berkualitas, namun dengan minimnya pengawasan, dan ketidakmampuan untuk memberikan jaminan harga membuat kakao berkualitas tidak menarik. Program pertanian kontrak yang diimplementasikan oleh Kalimajari mengupayakan untuk memecahkan masalah ini dengan menghubungkan petani dengan pembeli biji kakao berkualitas.

Pertanian kontrak mengatur beberapa hak dan kewajiban yang disepakati antara pembeli dan petani (Fachexpertise, n.d.). Kontrak menjabarkan standar kualitas khusus dan termasuk harga yang sudah ditentukan sebelumnya yang memungkinkan penjual kakao dapat menjual produk mereka. Menyetujui kontrak berarti pembeli diwajibkan untuk membeli kakao dari petani pada harga-harga khusus yang sudah diberikan dan bahwa biji kakao sudah memenuhi standar-standar tertentu. Kalimajari menggunakan pertanian kontrak untuk meningkatkan kesejahteraan petani kakao. Kalimajari awalnya memiliki perjanjian dengan 19 pembeli kakao, termasuk di antaranya Valrhona di Perancis, dan Pipiltin dan juga Cau Chocolate Bali di Indonesia. 19 pembeli tersebut memesan pada petani untuk memproduksi biji kakao yang sudah difermentasikan dan bersertifikasi internasional. Kalimajari kemudian melatih petani kakao dengan GAP. Pelatihan ini memastikan 619 petani mendapatkan sertifikasi dari USDA Organic, badan sertifikasi organik dari Amerika Serikat, dan UTZ, badan sertifikasi pelestarian dari Belanda. Dalam sebuah studi oleh Neilson dan Mckenzie (2016), disebutkan bahwa permintaan untuk kakao yang stabil dan bersertifikasi sangat berpotensi untuk meningkatkan pemain utama di industri ini untuk mulai menekankan pentingnya keberlanjutan. Hal ini kemudian akan membuat sertifikasi petani menjadi semakin berharga.

19 pembeli tersebut membeli dengan harga antara Rp40.000 dan Rp50.000 per kilogram biji kakao, yaitu dua kali lipat lebih tinggi dari harga biji kakao yang difermentasi yang biasanya hanya dijual oleh petani Indonesia dengan harga Rp20.000 - Rp25.000 per kilo. UTZ dan USDA Organic juga mengunjungi petani di Jembrana, Bali, untuk melatih mereka dengan teknik penanaman dan pematangan yang lebih baik.

Program ini mendorong petani untuk memproduksi kakao berkualitas lebih tinggi, karena menjamin petani bisa mendapatkan penghasilan lebih besar dari produk berkualitas premium mereka. Kebanyakan petani di Indonesia berhati-hati dalam menempatkan sumber daya ekstra untuk meningkatkan kualitas, karena pasar yang ada belum dikembangkan hingga bisa memberikan mereka insentif atas upaya mereka. Akan tetapi, pertanian kontrak memberikan mereka kepercayaan diri ekstra untuk memproduksi produk yang lebih kompetitif. Hal ini juga sudah dicatat dalam studi oleh Neilson dan Shonk (2014). Edukasi yang diberikan oleh Kalimajari melalui proyek ini menyediakan keuntungan tambahan bagi petani dengan memperbolehkan mereka untuk terus meningkatkan kualitas produktivitas secara mandiri.

PENGAWASAN DI LAPANGAN

Sejumlah besar kekurangan program pemerintah adalah pada pengawasan lapangan dan pemahaman kondisi lokal. Hal ini membuat alokasi sumber daya yang efektif menjadi sulit. Vicol et al. (2018) menunjukkan bahwa sementara pemerintah Indonesia berinvestasi di program dukungan, mereka tidak memiliki staf di lapangan yang cukup untuk memastikan program-program ini dilakukan dengan benar. Akan tetapi, banyak pelaku sektor swasta yang memprioritaskan pengawasan lapangan. Keempat pelaku non-pemerintah yang telah disebutkan di atas, dalam studi ini setuju bahwa petani memerlukan pengawasan, bukan hanya lokakarya. Petani harus menggunakan pengetahuan yang mereka dapatkan langsung di lapangan. Nestlé, Swisscontact, Kirana Megatara, dan Kalimajari memberikan *Extension Officers* (EO) tugas utama untuk membantu petani dengan tantangan yang mereka hadapi sehari-hari. EO ini mengawasi pelaksanaan GAP, pemotongan, penanaman, memilih kloning yang tepat, dan penggunaan pupuk, benih, dan tanah yang baik. Berdasarkan wawancara dengan Swisscontact (2019), ketika penyuluh pertanian lapangan biasanya mengurus lebih dari lima komoditas per orang, EO yang dipekerjakan oleh sektor swasta hanya mampu satu komoditas. Hal ini memperbolehkan mereka untuk memahami betul setiap detail teknik pra dan pasca penanaman untuk kakao, kopi, dan karet.

Keempat pelaku tersebut memiliki jumlah EO yang sangat terbatas, kurang dari 100 untuk setiap perusahaan. Eksportir karet terbesar Indonesia, Kirana Megatara misalnya, hanya memiliki 30 EO yang tersebar di 15 pabrik mereka di Kalimantan dan Sumatera (Kirana Megatara, wawancara, 2019). Jumlah tersebut tidak akan cukup, karena setiap orang membimbing lebih dari 100 petani, maka dari itu para EO ini membangun kemitraan untuk memecahkan masalah ini. Mitra yang dimaksud termasuk pembeli produk, lembaga penelitian, dan LSM. Mereka semua bekerja sama dengan pihak non-pemerintah untuk mendukung kerja EO agar dapat meningkatkan total jumlah petani yang diawasi.

Baru-baru ini ada perubahan dalam kebijakan pemerintah yang mendorong penyuluh lapangan pemerintah untuk bekerja lebih dekat dengan EO (Gesha, 2019). Kementan sudah berkolaborasi dengan LSM dan perusahaan-perusahaan seperti Mars untuk memastikan tersedianya pengawasan untuk petani (Zainuddin, 2019). Model penyuluh lapangan pemerintah dapat lebih lanjut diuntungkan dari peningkatan kerja sama dengan para pelaku sektor swasta ini.

Baru-baru ini ada perubahan dalam kebijakan pemerintah yang mendorong penyuluh lapangan pemerintah untuk bekerja lebih dekat dengan EO.

Tabel 3.
Kemitraan untuk perluasan layanan

Swisscontact	SECO Switzerland, Barry Callebaut, Big Tree Farm, Cargill, Ecom, Guittard, JB Cocoa, Krakakoa, Mars, Mondelez International, Nestlé, Cocoa Sustainability Partnership Indonesia & PISAgro
Kalimajari	Jembrana District Government, Kerta Semaya Samaniya Union, Barry Callebaut, Pipiltin, Valrhona, Cau Chocolate Bali, Rainforest Alliance, UTZ, Indonesia Coffee and Cocoa Research Institute. & Cocoa Sustainability Partnership Indonesia
Nestlé	Indonesia Coffee and Cocoa Research Institute, Nestle Research & Development Centre in Tours – France, Swisscontact, & PISAgro
Kirana Megatara	PISAgro, Apollo, Bridgestone, Continental, Cooper Tires, Fate, Good Year, Gajah Tunggal, Hankook, Kumho Tyres, Michelin. Nexen, Pirelli, Sumitomo, Toyo Tires, Yokohama Rubber & Mercedes Benz

Sumber: Mitra diidentifikasi melalui wawancara dan laman web perusahaan

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PENDAPATAN YANG DICAPAI DENGAN INISIATIF SEKTOR SWASTA

Inisiatif sektor swasta yang dideskripsikan di atas berkontribusi terhadap membaiknya tingkat produktivitas. Keempat pelaku tersebut secara signifikan telah meningkatkan produktivitas di sektor mereka masing-masing dengan memberikan edukasi kepada petani mengenai kualitas dan keberlanjutan, mempertimbangkan perbedaan wilayah, dan menyediakan pengawasan yang cukup.

Swisscontact, dengan pengalaman selama 7 tahun dalam mengawasi 154.000 petani kakao di bawah *Sustainable Cocoa Production Program* (SCPP) menjelaskan bahwa hasil dari upaya mereka bisa berbeda-beda. Petani pemula, dengan pengawasan Swisscontact selama 2 tahun, dapat mencapai produktivitas rata-rata sebesar 0,62 ton/hektare per tahun. Petani dengan pengawasan 6 tahun, dapat mencapai produktivitas rata-rata 0,93 ton/hektare, dan akhirnya, petani profesional dapat mencapai produktivitas rata-rata hingga setinggi 2,5 ton/hektare per tahun. Di lain pihak, Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat produktivitas nasional kakao sebesar 0,4 ton/hektare per tahun, maka dari itu produktivitas rata-rata petani Swisscontact secara signifikan lebih tinggi daripada tingkat produktivitas rata-rata di Indonesia. Produktivitas petani dengan pengawasan Swisscontact dicatat 55% lebih tinggi untuk petani pemula, 133% lebih tinggi untuk petani dengan pengawasan 6 tahun, dan 625% lebih tinggi untuk petani profesional.

Swisscontact telah sukses meningkatkan angka produktivitas sekitar 154.000 petani kakao, dan mereka percaya bahwa dengan bimbingan yang tepat, dan pelaksanaan GAP yang konsisten, produktivitas kakao Indonesia bisa mencapai hingga 2 ton/hektare, yaitu lebih dari empat kali lipat lebih tinggi dari tingkat produktivitas saat ini seperti yang dilaporkan oleh Kementan. Proyeksi produktivitas sebesar 2 ton/hektare per tahun dikonfirmasi oleh Kementan (Zainuddin, 2019).

Kalimajari yang hanya mengelola sekitar 619 petani kakao dengan setiap petani memiliki lahan kurang dari 1 hektare, mencatat produktivitas yang tidak terlalu lebih tinggi dibandingkan tingkat produktivitas rata-rata Kementan dan FAO. Akan tetapi, biji kakao mereka dibeli dengan harga yang lebih mahal karena kualitas fermentasi mereka. Produktivitas rata-rata adalah sebesar 0,3 ton/hektare untuk satu periode panen - 0,6 ton/hektare per tahun. Petani menerima Rp40.000 per kilo, yang artinya petani yang menjual ke Kalimajari menghasilkan setidaknya Rp12 juta per panen, atau Rp24 juta per tahun. Pendapatan tersebut jauh lebih tinggi daripada petani kakao yang menjual produk mereka hanya Rp20.000 per kilo, dan tidak dapat menutup harga rendah tersebut dengan produktivitas yang lebih besar.

Nestlé telah mengawasi 20.000 petani kopi di Lampung untuk lebih dari 30 tahun dan telah mencapai produktivitas rata-rata 1,2 ton/hektare per tahun. Angka ini dua kali lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata produktivitas petani kopi Indonesia, yaitu sekitar 0,5 ton/hektare. Angka tersebut 20% lebih tinggi daripada rata-rata produktivitas kopi di Kolombia, yang hanya sekitar 1 ton/hektare. Nestlé dan the Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute (ICCRI) setuju bahwa produktivitas kopi di Indonesia masih rendah, dan ahli kopi independen dengan

Keempat pelaku tersebut secara signifikan telah meningkatkan produktivitas di sektor mereka masing-masing dengan memberikan edukasi kepada petani mengenai kualitas dan keberlanjutan, mempertimbangkan perbedaan wilayah, dan menyediakan pengawasan yang cukup.

pengalaman mengelola bisnis kecil kopi puluhan tahun mengklaim bahwa produktivitas kopi Indonesia masih bisa ditingkatkan (Coffee Business Expert, 2019). Kesimpulan umumnya adalah produsen kopi Indonesia seharusnya bisa mencapai tingkat produktivitas lebih dari 1 ton/hektare per tahun dalam kondisi yang optimal.

Akhirnya, Kirana Megatara telah melihat 8.000 petani karet yang mereka bimbing telah mencapai tingkat produktivitas 1,2 ton/hektare per tahun. Produktivitas petani karet Kirana Megatara adalah 36% lebih tinggi daripada produktivitas karet nasional yang dilaporkan sekitar 0,88 ton/hektare. Petani mencapai angka tersebut dengan berinvestasi kembali di perkebunan karet mereka, karena mereka mendapatkan keuntungan lebih tinggi dari penjualan berkualitas ke Kirana Megatara.

Baik Kirana Megatara dan the Indonesian Rubber Research Institute (IRRI) setuju bahwa produktivitas karet di Indonesia seharusnya dapat mencapai 1,7 ton per hektare, yaitu angka yang secara signifikan lebih tinggi daripada tingkat produktivitas saat ini yang diklaim oleh FAO di bawah 1 ton per hektare (Kirana Megatara, wawancara, 2019; IRRC, wawancara, 2019).

KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia menangani masalah produktivitas rendah pada industri kakao, kopi, dan karet ini dengan menawarkan bibit subsidi dan membagikan mesin, serta mencanangkan perluasan lahan perkebunan. Pihak non-pemerintah dan ahli dari industri swasta telah mengkritik hal tersebut, karena pendistribusian bibit, mesin, dan perluasan lahan cenderung dilakukan tanpa memastikan kalau inisiatif tersebut akan menguntungkan para petani. Terdapat kurangnya pertimbangan terhadap perbedaan regional, pengawasan, dan edukasi petani, yang mengurangi keefektifan program pemerintah. Lebih lanjut lagi, kalau tidak ada pasar untuk produk berkualitas lebih baik, maka berapa pun dukungan dari pemerintah untuk mendorong petani berinvestasi dalam hal kualitas tidak akan pernah cukup. Data resmi membuktikan bahwa percobaan-percobaan ini tidak efektif, karena nyatanya produktivitas kakao, kopi, dan karet di Indonesia masih tertinggal dari para produsen utama dunia.

Di lain pihak, upaya yang dibuat oleh Swisscontact, Nestlé, Kirana Megatara, dan Kalimajari berhasil meningkatkan produktivitas kakao, kopi, dan karet, karena keempat pelaku ini menekankan pada edukasi petani dan meningkatkan kemandirian mereka. Para pelaku sektor swasta ini bekerja lebih dekat dengan petani dan memiliki lebih banyak pengetahuan tentang berbagai kebutuhan petani di daerah-daerah yang berbeda. Hal tersebut memperbolehkan mereka untuk mengubah program dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Mereka juga memandang penting pengawasan, dan telah menjalin komunikasi baik dengan banyak organisasi untuk meningkatkan jumlah pengawas lapangan yang tersedia untuk bekerja dengan para petani mereka. Pelaku sektor swasta menyediakan petani akses ke pinjaman bank sehingga mereka dapat menjaga aktivitas kebun mereka, dan mengedukasi mereka dengan literasi finansial sehingga mereka dapat terus mengakses layanan-layanan yang ada dengan mandiri. Perusahaan seperti Kirana menciptakan ruang di mana kualitas dihargai dan mereka juga memastikan para petani dapat mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dengan memproduksi produk yang berkualitas lebih tinggi, yang lebih kompetitif di pasar internasional. Inisiatif oleh Kalimajari juga mempromosikan produk berkualitas, memastikan kestabilan harga yang aman, dan mengedukasi petani, memberikan mereka sertifikat yang dapat meningkatkan daya jual mereka. Inisiatif-inisiatif tersebut menargetkan peningkatan kemandirian.

Melihat bagaimana inisiatif swasta oleh pihak non-pemerintah telah meningkatkan produktivitas, maka disarankan bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan para pelaku sektor swasta. Pemerintah dapat memasukkan inisiatif-inisiatif sukses ini ke dalam program pemerintah atau bekerja sama dengan pelaku sektor swasta untuk memperluas jangkauan dan dampak mereka ke seluruh Indonesia. Beberapa program pemerintah telah mulai melibatkan pelaku sektor swasta pada tingkat lokal dan provinsi, dan terus mengadvokasikan terjalannya kerja sama.

Badan-badan pemerintah dan organisasi terkait lainnya seperti Indonesian Cocoa Commission (ICC), dan Cocoa Sustainability Partnership (CSP) yang mengkoordinasikan pemerintah, LSM, dan para pelaku sektor swasta domestik di industri kakao telah ada sejak awal 2000an. Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan badan internasional seperti International Cocoa Organization.

Pada Mei 2019, Direktur Jenderal Perkebunan, Kasdi Subagyo, mengunjungi pusat penelitian kakao Mars di Pangkep untuk melihat bagaimana produsen utama tersebut memproduksi biji kopi berkualitas superior mereka (Zainuddin, 2019). Bapak Dirjen mengenal Mars sebagai panutan, dan berencana melakukan program penanaman BUN 500 yang akan datang sesuai dengan program yang dijalankan Mars. Pada pertemuan tersebut baik Mars dan pihak pemerintah menekankan pentingnya bekerja sama.

Penekanan pada kemitraan juga digaungkan oleh para staf saat pembukaan pertemuan untuk perluasan penyediaan layanan pertanian di Yogyakarta pada bulan Juli di tahun yang sama. Seorang pimpinan Kementan, Momon Rusmono, berbicara untuk mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan swadaya. Ia mengetahui bahwa ketiga pihak tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan dan ketahanan petani, namun mereka melakukan pendekatan dengan berbeda-beda. Dengan menggabungkan ketiga metode tersebut, ia mengatakan, penyuluh swasta dapat membantu petani untuk mencapai peningkatan produktivitas dan keberlanjutan (Gesha, 2019).

Pihak pemerintah lainnya seperti Direktur Koordinator Koordinasi Pangan dan Pertanian, Musdhalifah Machmud juga telah menekankan pentingnya kerja sama dan mendorong adanya panduan dari sektor swasta. Pada 2018, Direktur Jenderal Tanaman Perkebunan, Ir. Bambang, menekankan perlunya untuk menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dalam merancang program, dan meminta pelaku sektor swasta untuk membantu menyediakan data produksi yang akurat, setelah mengetahui bahwa data produk Kementan untuk industri kakao terlihat kontradiktif dengan apa yang dilihat langsung oleh para peneliti di lapangan (Cocoa Sustainability Partnership, 2018).

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mau berkoordinasi dengan sektor swasta dan mengadopsi metode baru dari program sektor swasta. Keterlibatan pemerintah dalam Cocos Sustainability Partnership (CSP) dan institusi bersama pemerintah-swasta lainnya seperti yang disebutkan di atas dipandang baik oleh para pelaku industri. Sebuah makalah oleh Diaz Rios (2013) mencatat bahwa inisiatif dan institusi semacam ini cenderung mendapatkan daya tarik lebih besar dari perusahaan penjual dan produsen internasional ketimbang pemerintah itu sendiri. Mereka mewakili kesempatan yang dapat lebih efektif dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendukung perkembangan sektoral jangka panjang. Pemerintah harus terus menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan berbagai industri dan mengacu kepada mereka untuk panduan dan bimbingan. Dengan menggabungkan upaya inisiatif sektor swasta, yang dibuat lebih sesuai dengan kebutuhan lokal tapi secara umum berlaku untuk skala yang lebih kecil, maka upaya yang dilakukan dapat menjangkau lebih banyak petani melalui jaringan pemerintah. Sebaliknya, program pemerintah, yang seringkali kurang informasi dan diimplementasikan dengan tidak efektif, akan mendapat lebih banyak pengetahuan lokal dan industri yang khusus.

REFERENSI

- Administrator. (n.d). Upaya memperoleh data komoditas perkebunan yang berkualitas. Retrieved from <http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-260-upaya-memperoleh-data-komoditas-perkebunan-yang-berkualitas.html>
- ASEAN Rubber Business Council. (2019). Joint communique/media release on special ministerial committee meeting (MCM) 2019 - international tripartite rubber council. Thailand. Retrieved from <http://aseanrubber.net/arbc/index.php/market-news/market/701-itrc-media-release-22-feb-2019>
- Ashari & S. Friyatno. (2006). Perspektif pendirian bank pertanian di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 24(2), 107-122.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Laporan perekonomian Indonesia 2018. Badan Pusat Statistik.
- Badan Standardisasi Nasional. (2017). Standar nasional Indonesia aaret alam – spesifikasi teknis (ISO 2000:2014, MOD). Retrieved from <https://edoc.pub/sni-1903-2017-sirpdf-pdf-free.html>
- Bekraf. (2017). Indonesian coffee craft and culture. Afterhours Book.
- Bank Indonesia. (2019). The special data dissemination standard, 2019. Retrieved from <https://www.bi.go.id/sdds/>
- Bappenas. (2011). Masterplan acceleration and expansion of Indonesia economic development 2011-2025. Coordinating Ministry for Economic Affairs, Jakarta. p. 22
- Cocoa. (2016). Retrieved from <https://www.indonesia-investments.com/business/commodities/cocoa/item241>
- Competitive and dynamic value chain for Indonesian coffee. (2015). *Prepared for the Ministry of Trade, the Republic of Indonesia*.
- Coordination meeting of cocoa policy at coordinating ministry for economic affairs.(2018). Retrieved from <http://www.csp.or.id/news/jLtKW-coordination-meeting-of-cocoa-policy-at-coordinating-ministry-for-economics-affairs.html>
- Coordinating Ministry for Economic Affairs. (2011). Masterplan for acceleration and expansion of Indonesia economic development 2011 – 2025. Coordinating Ministry for Economic Affairs, Jakarta.
- Department of Industry, Directorate General of Agricultural Industry. (2009). Roadmap coffee processing Industry. Ministry of Industry, Jakarta.
- Diaz Rios, L. (2013). *Evolving role of commodity authorities in coffee, cocoa, and tea sections of Indonesia*. Report to the world bank.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2017). Statistik perkebunan Indonesia komoditas kakao 2016-2018. Kementerian Pertanian,
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2017). Statistik perkebunan Indonesia komoditas karet 2017-2019. Kementerian Pertanian.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2017). Statistik perkebunan Indonesia komoditas kopi 2017-2019. Kementerian Pertanian.

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. (2015) Rencana strategis: Direktorat jenderal perkebunan tahun 2015-2019. Retrieved from <http://ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcepuk/gambar/file/info-publik/Rentra%20Ditjenbun%202015-2019.pdf>

Fachexpertise. (n.d). Retrieved from <https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz2013-en-contract-farming-manual.pdf>

FAOSTAT. (n.d.). Cocoa yield from 2012 to 2017. Retrieved from <http://www.fao.org/faostat/en/#compare15/07/2019>

FAOSTAT. (n.d.). Coffee yield from 2012 to 2017. Retrieved from <http://www.fao.org/faostat/en/#compare15/07/2019>

FAOSTAT. (n.d). Rubber yield from 2012 to 2017. Retrieved from <http://www.fao.org/faostat/en/#compare15/07/2019>

Fold, N. & Neilson, J. (2018). Sustaining supplies in smallholder-dominated value chains. *The Economics of Chocolate*, pp. 195-212

GAPKINDO. (2019). March news releases. Retrieved from Global Business Guide Indonesia.

(2014).Indonesia's coffee industry needs growth capital. Jakarta Post.Retrieved from http://www.gbgindonesia.com/en/agriculture/article/2014/indonesia_s_coffee_industry_needs_growth_capital.php

Gesha. (2019). *Kolaborasi penyuluh wujudkan kuatnya korporasi petani*. Retrieved from <https://tablidsinartani.com/detail/indeks/agri-penyuluhan/9156-Kolaborasi-Penyuluh-Wujudkan-Kuatnya-Korporasi-Petani>

Global Business Guide Indonesia. (2016). Indonesia's rubber industry: Increased competition and falling prices.Retrieved from http://www.gbgindonesia.com/en/agriculture/article/2016/indonesia_s_rubber_industry_increased_competition_and_falling_prices_11520.php

Hasbi Zinuddin. (2019). *Genjot 160 juta bibit kakao, kementan adopsi perkebunan mars*. Retrieved from <https://makassar.terkini.id/genjot-160-juta-bibit-kakao-kementan-adopsi-perkebunan-pt-mars/>

IBP, Inc. (2016). Indonesia rubber and rubber product manufacturing export-import and business opportunities handbook - Strategic information and contacts.IBP, Inc. p 74

Iqbal Rafani. (2015). Strategic plan of Indonesian ministry of agriculture: 2015-2019. Retrieved from http://ap.fttc.agnet.org/ap_db.php?id=416&print=1

Jasman, Thomas. (2016). Indonesia's cocoa industry: Lack of supply still hampers growth and investment. Global business Indonesia guide. Retrieved from http://www.gbgindonesia.com/en/agriculture/article/2016/overview_of_indonesia_s_cocoa_industry_lack_of_supply_still_hampers_growth_and_investment_11670.php

Susilo, J., Nasution, R. (2019). Jokowi orders use of rubberized asphalt for helping rubber farmers. *Antara News Agency*. Retrieved from <https://en.antaranews.com/news/122598/jokowi-orders-use-of-rubberized-asphalt-for-helping-rubber-farmers>

Kalimajari. (n.d). Pengalaman kerja. Retrieved from <http://kalimajari.org/pengalaman-kerja/>

Kirana Megatara. (n.d). History and milestone. Retrieved from <https://www.kiranamegatara.com/page/History-Milestone>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, H.E. Setyowati. (n.d). Perbaiki harga karet alam, pemerintah batasi kuota ekspor dan tingkatkan penggunaan karet di dalam negeri. Retrieved from <https://ekon.go.id/berita/print/perbaiki-harga-karet-alam.4611.html>, 2

Kementerian Pertanian. (2014). Peraturan menteri pertanian republik Indonesia nomor 67/permentan/OT.140/5/2014. Kementerian Pertanian, Jakarta.

Kemlu RI. (2012). Cocoa diplomacy: Reclaiming Indonesia's glory. Retrieved from <https://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/cacao-diplomacy.aspx>

Leimona B, Amaruzaman S, & alt. (2015). 'Indoonesia's 'Green agriculture strategies and policies: Closing the gap between aspirations and application.' Occasional Paper 23. Nairobi: World Agroforestry Center

M. S. Oktaviani, R. Syarief, & M. Najib. (2016). The effect of application of Indonesia national standard on cocoa industry and strategy to face the Asean economic community in 2015. *ASEAN Journal of Economics, Management, and Accounting*, 2(1-2), 33

Nangoy, F. & M. Nicholson. (2018). Indonesia's growing thirst for coffee drains premium bean supplies. *Jakarta Post*. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/news/2018/06/22/indonesias-growing-thirst-for-coffee-drains-premium-bean-supplies.html>

Neilson, F. (2007). *Global private regulation and value chain restructuring in Indonesian smallholder coffee systems*. Elsevier.

Neilson, J. (2007). Global markets, farmers and the state: sustaining profits in the Indonesian cocoa sector. *Bulletin of Indonesian economic studies*. 43(2), pp. 227-250.

Neilson, J., Hartatri, D. F., Vicol, M. (2019). 9 myths about coffee farmer development.

Neilson, J., Labaste, P. & Jaffee, S. (2015). *Towards a more competitive and dynamic value chain for Indonesian coffee*. No. 7. Prepared for the World Bank, Washington DC.

Neilson, J & McKenzie, F. (2016). Business-oriented outreach programmes for sustainable cocoa production in Indonesia: an institutional innovation. *Emerging institutional innovations*. Food and agriculture organization of the United Nations (FAO) & Institute national de la recherche agronomique (INRA). Rome.

Nestlé. (n.d). Cocoa. Retrieved from <https://www.nestle.com/csv/raw-materials/nestle-cocoa-plan>(accessed on July 23, 2019)

Nestlé. (2019). Nestlé: Good food, good life. Retrieved from www.nestle.com

Nestlé. (2019). Sejarah perusahaan Nestlé. Retrieved from <https://www.nestle.co.id/ina/tentangnestle/sejarah>

OECD. (2012). *OECD Review on agricultural policies*. OECD Publishing.

GERNAS. (2008). *Masukan strategis dari Cocoa Sustainability Partnership (CSP)*.

Rachmadea Aisyah. (2019). Indonesia slashes rubber exports to stabilize price. *The Jakarta Post*. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/news/2019/04/05/indonesia-slashes-rubber-exports-stabilize-price.html>

Rubiyo & Siswanto. (2012). Peningkatan produksi & pengembangan kakao di Indonesia. *Buletin Risti*, 3(1), 44

Sitepu, M. H., al. (2016). Towards a framework for sustainable development planning in the Indonesian natural rubber industry supply network. *Procedia CIRP*. 48, pp. 164-169.

Soetanto, Abdullah. (2017). Opportunity and challenge of Indonesian cocoa. *Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute*. Retrieved from <http://incosy.iccri.net/wp-content/uploads/2017/10/Session-1-Soetanto-Abdoellah-Opportunity-and-Challenge-of-Indonesian-Cocoa.pdf>.

Singapore Commodity Exchange. (n.d). Rubber prices 2014-2019. Retrieved from <https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rubber&months=60>(accessed on July 15, 2019)

Swisscontact. (2017). Collateral in cocoa farmer financing. Retrieved from https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Indonesia/Documents/Publications/Collateral_in_Cocoa_Farmer_Financing__ENG__preview.pdf

Swisscontact. (2019). Indonesia. Retrieved from <https://www.swisscontact.org/en/country/indonesia/home.html>

Swisscontact. (n.d). *Projects: Sustainable cocoa production program (SCPP)*. Retrieved from <https://www.swisscontact.org/nc/en/country/indonesia/projects/projects-indonesia/project/-/show/sustainable-cocoa-production-program-scpp.html>(accessed on July 23, 2019)

Tokyo Commodity Exchange. (2010). TOCOM and SICOM collaborate to develop commodities market. Retrieved from <https://www.tocom.or.jp/news/2010/20100601.html>

Vicol, M., Neilson J., Hartatri, D., & Cooper, P. (2018). Upgrading for whom? Relationship coffee, value chain interventions and rural development in Indonesia. *World Development*. 110 (26-37).

Wawancara

Swisscontact. (2019). Personal communication.

Cocoa Sustainability Partnership. (2019). Personal communication.

Kirana Megatara. (2019). Personal communication.

Nestle. (2019). Personal communication.

Kalimajari. (2019). Personal communication.

Coffee Business Expert. (2019). Personal communication.

ICCRI. (2019). Personal communication.

IRRC. (2019). Personal communication.

TENTANG PENULIS

Mercyta Jorsvinna Glorya adalah Peneliti Junior di CIPS. Fokus penelitian Mercyta adalah masalah Peluang Ekonomi, Masyarakat Sipil, terutama masalah minuman alkohol ilegal. Dia memperoleh gelar sarjana dari Universitas Gadjah Mada, mengambil jurusan Hubungan Internasional.

Arief Nugraha adalah Peneliti Junior di CIPS. Fokus penelitian Arief adalah masalah agrikultur dan pedesaan. Sebelumnya, dia pernah bekerja di sebuah firma riset pasar B2B dan bertanggung jawab untuk data kualitatif

Maeve Milligan merupakan pemegang internasional di Center for Indonesian Policy Studies. Dia sedang menyelesaikan gelar Studi Asia dan Pasifik di Universitas Victoria, Kanada. Saat ini dia membantu penelitian CIPS dan mengumpulkan data untuk proyek *Indeks Bu RT*. Sebagai mahasiswa dia melakukan penelitian mengenai kebijakan etnis minoritas di Tiongkok, serta sejarah dan implikasinya di masa depan. Dia tertarik tentang bagaimana kebijakan direfleksikan dan dampaknya terhadap budaya.

Pingkan Audrine Kosijungan adalah seorang Peneliti Muda di Center for Indonesian Policy Studies dengan fokus penelitian di bidang Kesempatan Ekonomi. Pingkan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Katolik Parahyangan.

Nadia Fairuza Azzahra adalah Peneliti Muda di Center for Indonesian Policy Studies. Pada saat ini, ia sedang melakukan riset di bidang pendidikan. Sebelum bergabung dengan CIPS, Nadia melakukan magang di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, Filipina. Ia juga memiliki pengalaman bekerja di sebuah perusahaan rintisan berbasis pendidikan di Indonesia.

DUKUNG CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES

Kontribusi Anda memungkinkan CIPS untuk melakukan penelitian dan advokasi rekomendasi berbasis bukti untuk membantu masyarakat kurang mampu di Indonesia menjadi bebas dan sejahtera.



Pindai untuk Berdonasi



TENTANG CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non profit yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial oleh para donatur dan filantropis yang menghargai independensi analisis kami.

FOKUS AREA CIPS:

Ketahanan Pangan dan Agrikultur: Memberikan akses terhadap konsumen di Indonesia yang berpenghasilan rendah terhadap bahan makanan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan berkualitas. CIPS mengadvokasi kebijakan yang menghapuskan hambatan bagi sektor swasta untuk beroperasi secara terbuka di sektor pangan dan pertanian.

Kesempatan Ekonomi: CIPS mengadvokasi kebijakan yang bertujuan untuk memperluas kesempatan ekonomi dan peluang bagi pengusaha dan sektor bisnis di Indonesia, serta kebijakan yang membuka peluang lebih luas bagi masyarakat Indonesia berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pendapatan yang lebih layak dan menciptakan kesejahteraan ekonomi


Kebijakan Pendidikan: Masa depan SDM Indonesia perlu dipersiapkan dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan terhadap perkembangan abad ke-21. CIPS mengadvokasi kebijakan yang mendorong sifat kompetitif yang sehat di antara penyedia sarana pendidikan. Kompetisi akan mendorong penyedia sarana untuk terus berupaya berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan terhadap anak-anak dan orang tua yang mereka layani. Secara khusus, CIPS berfokus pada peningkatan keberlanjutan operasional dan keuangan sekolah swasta berbiaya rendah yang secara langsung melayani kalangan berpenghasilan rendah.

Kesejahteraan Masyarakat: CIPS mempercayai bahwa komunitas yang solid akan menyediakan lingkungan yang baik serta mendidik bagi individu dan keluarga mereka sendiri. Kemudian, mereka juga harus memiliki kapasitas untuk memiliki dan mengelola sumber daya lokal dengan baik, berikut dengan pengetahuan mengenai kondisi kehidupan yang sehat, agar mereka bisa mengelola pembangunan dan kesejahteraan komunitas dengan baik.

www.cips-indonesia.org

 facebook.com/cips.indonesia

 [@cips_id](https://twitter.com/cips_id)

 [@cips_id](https://www.instagram.com/cips_id)

Jalan Terogong Raya No. 6B
Cilandak, Jakarta Selatan 12430
Indonesia